

## Upaya Pengurus Ranting NU Karangjoho Dalam Mewujudkan *Civil Society* Di Desa Karangjoho

Rizky Syaputra<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Indonesia  
\* rizky23@gmail.com

### Article history

Submitted: 2024/09/08; Revised: 2024/21/08; Accepted: 2024/29/08

### Abstract

*Wacana Civil Society kembali marak diperbincangkan di Indonesia ketika terjadi perubahan kondisi sosial politik yang disponsori oleh gerakan Reformasi. Dari latar belakang tersebut diambil rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana upaya Pengurus Ranting NU Karangjoho dalam mewujudkan Civil Society di Desa Karangjoho Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo?. (2) Apa hambatan Pengurus Ranting NU Karangjoho dalam membangun Civil Society di Desa Karangjoho, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo? Untuk menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini dirancang dalam bentuk penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara observasi dan dokumentasi. Terdapat dua faktor yang menjadi hambatan Ranting NU Karangjoho dalam melakukan Civil Society yakni: Faktor internal yang meliputi, Kurangnya fasilitas infrastruktur yang cukup, Kurangnya masalah pendanaan, Minimnya modal sumber daya manusia, Kurangnya profesional pengurus dalam menjalankan roda organisasi, Semakin berkurangnya para tokoh sesepuh NU, Kurangnya antusiasme jamaah NU dalam kegiatan ranting. Faktor eksternal meliputi, Minimnya partnersip Ranting NU Karangjoho dan Kurang tertariknya masyarakat umum pada NU Ranting Karangjoho*

### Keywords

Civil Society, NU, Reformasi



© 2024 by the authors. This is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

## 1. Pendahuluan

Di kalangan publik, *Civil Society* diinterpretasikan dan diadaptasi dalam berbagai kosakata. Ada yang mengistilahkan dengan masyarakat madani, masyarakat kewargaan, masyarakat warga, masyarakat utama, masyarakat sipil dan terakhir tetap menggunakan terminologi *Civil Society*, tanpa berupaya menterjemahkan lagi sebagaimana yang tetap digunakan dalam penelitian ini ( Hikam: 1996).

Berbagai kajian pemikiran sosial politik Islam di Indonesia memang telah banyak memperbincangkan tentang teori sosial dan konsep-konsep politik modern yang erat kaitanya dengan *Civil Society*, seperti kajian tentang demokrasi, hubungan negara dengan rakyatnya, posisi agama dan negara maupun *Civil Society* itu sendiri. Namun demikian di antara kajian yang ada tentang *Civil Society* selama ini, bersifat teoritis dan banyak sekali data empirik dan kajian praktis historitasnya (Baso: 1999).

Indonesia sendiri mempunyai tradisi kuat tentang *Civil Society* dan masyarakat madani, bahkan jauh sebelum Negara ini berdiri, masyarakat madani telah berkembang pesat yang di wakili oleh kiprah keberagaman organisasi social keagamaan dan pergerakan nasional dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Ada berbagai macam organisasi yang tumbuh dan berkembang dikalangan masyarakat madani, salah satu organisasi social kemasyarakatan keagamaan yang masih exis dan terus menunjukkan mkiprahnya sebagai komponen *Civil Society* yaitu Nahdhatul Ulama (NU). Nahdhatul Ulama mempunyai peran strategis dalam mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan Negara yang kiranya dapat mewujudkan nilai-nilai *Civil Society*. Karena dalam masyarakat NU memiliki akar kuat semangat toleransi sampai ke pelosok-pelosok pedesaan. Nahdhatul Ulama yang memiliki nilai-nilai tradisi pesantren, dimana cikal bakal lahirnya Nahdhatul Ulama itu sendiri terbentuk atas peran para kyai-kyai pesantren. Di mana didalamnya memiliki corak keberagaman metode pembelajaran, madzhab yang di anut sehingga telah terlatih menjadi organisasi yang toleran terhadap perbedaan.

Pandangan Abdurrahman Wahid sebagai tokoh penting dalam Nahdhatul Ulama berpendapat dengan wacana masyarakat sipil sesungguhnya merujuk pada konsepsi *Civil Society* yang menitik beratkan esensinya pada aspek otonomi dan kemandirian masyarakat. Kelompok atau gerakan manapun bisa disebut sebagai gerakan *Civil Society* selama orientasi pergerakannya diarahkan untuk memperjuangkan tempat dan posisi masyarakat dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara (Qomar: 2002). Sedangkan di lingkungan desa Karangjoho dimana mayoritas masyarakat beragama islam dan mengikuti ajaran Nahdahatul Ulama, di buktikan dengan masih aktifnya peranan pengurus dan anggota ranting NU

Karangjoho dalam mewujudkan Civil Society dalam berbagi kegiatan. Terlebih lagi di dalam visinya telah tertuang membumikan Islam yang Rahmatan Lil 'Alamin sesuai akidah Ahlussunnah Wal Jama'ah, sebagai pedoman dalam bermasyarakat. Namun dalam mewujudkan Civil Society di lingkungan masyarakat desa Karangjoho masih terhambat berbagi faktor salah satunya masalah sumberdaya manusia yang masih belum kuat. Sedangkan sumber daya manusia memegang peranan penting dalam mewujudkan Civil Society.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menjadi penting bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang Upaya Pengurus Ranting NU Karangjoho dalam mewujudkan Civil Society di desa Karangjoho. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui profil dan kegiatan di Ranting NU desa Karangjoho, Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui upaya yang dilakukan pengurus Ranting NU desa Karangjohodalam mewujudkan Civil Society Di desa Karangjoho. Dan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan yang dihadapi pengurus Ranting NU desa Karangjohodalam mewujudkan Civil Society Di desa Karangjoho

## **2. Metode**

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Secara sederhana penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman dengan metodologi berupa penyelidikan pada suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Metode penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian (Salim: 2015). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada informan yang telah ditentukan sebelumnya. Sampel diambil dengan teknik *purposive sampling*, yakni memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalah yang akan diteliti secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang tepat. Selain itu peneliti juga melakukan observasi mengenai Ranting NU yang ada di Desa Karangjoho dengan mengamati kondisi dan situasi di tempat tersebut. Peneliti juga akan melakukan wawancara terhadap orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan judul yang dipilih diantaranya : tokoh masyarakat setempat, beberapa masyarakat yang ada di sekitar wilayah Desa Karangjoho, para masyarakat, para Pengurus Ranting NU, dan para priyai NU. dan yang terakhir peneliti akan menganalisis sumber dari dokumen yang diperoleh dari sumber yang ada (Deddy: 2008).

## **3. Hasil dan Pembahasan**

Jika dipahami sepintas masyarakat madani merupakan format kehidupan alternatif

yang mengedepankan semangat demokrasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Hal ini diberlakukan ketika negara sebagai penguasa kurang mampu menegakkan pilar demokrasi dan hak asasi manusia dalam menjalankan roda pemerintahan. Di sinilah kemudian konsep masyarakat madani menjadi kontrol masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang pada akhirnya nanti terwujud kekuatan masyarakat dan menengakkan konsep hidup yang demokratis dan menghargai hak-hak manusia.

masyarakat madani adalah sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu, perkumpulan sukarela yang terbatas dari negara, suatu ruang publik yang mampu mengendalikan diri dan independen, yang secara bersama-sama mengakui norma-norma dan budaya yang menjadi identitas, dan solidaritas yang terbentuk serta akhirnya akan terdapat kelompok inti dalam masyarakat madani ini (Ubaedillah: 2006).

Dalam pandangan Muhammad A.S Hikam dalam membahas persoalan *Civil Society* beliau selalu menggunakan dua tataran, yakni, pertama tataran institutional sosiaologis dan kedua, tataran ideal menyangkut visi. Perlunya penguatan masyarakat dalam komunitas Negara untuk mengimbangi dan mampu mengontrol kebijakan Negara yang cenderung memposisikan warga negaranya sebagai subjek yang lemah. Untuk itu maka diperlukan penguatan masyarakat sebagai prasyarat untuk mencapai kekuatan masyarakat yang cerdas di hadapan Negara tersebut.

Pada tataran institusional, bagaimana harus diakui bahwa akar-akar *Civil Society* di Indonesia sudah ada sejak lama, sekalipun sangat sederhana, seperti lembaga *intermediatery* antara Negara dan masyarakat, baik yang bersifat tradisional maupun modern, termasuk yang dimiliki oleh organisasi dan gerakan islam sejak zaman dahulu hingga sekarang. Oleh karenanya, pada tataran ini yang diupayakan adalah bagaimana mengembangkan lembaga itu menjadi semakin rasional, sehingga bisa melakukan kontak, komunikasi, atau *networking* dengan kelompok diluar gerakan-gerakan islam. Lembaga seperti Nahdhatul Ulama, Muhamadiyah, dan lain-lain secara institusional dan sosiologis meruakan akar *Civil Society* secara kelembagaan.

Sementara itu, pada tataran visi, kita agak mengalami kesulitan sebab sebuah visi dari *Civil Society* menuntut adanya kemampuan untuk menyerap nilai-nilai dari luar yang mungkin masih di anggap diluar islam seperti warisan-warisan *einlightement* : rasionalitas, sekularisasi, dan nilai-nilai demokrasi yang sangat humanitarian. Ini pun sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh pemikir-pemikir islam, terutama dalam

konteks modern seperti Abdurrahman Wahid (Baso: 1999).

Kebangkitan wacana civil society dalam NU diawali dengan momentum kembali ke khittah 1926 pada tahun 1984 yang mengantarkan Gus Dur sebagai Ketua Umum NU. Gus Dur memperkenalkan pendekatan budaya dalam berhubungan dengan negara sehingga ia dikenal sebagai kelompok Islam budaya, yang dibedakan dengan kelompok Islam Politik. Dari kandungan NU lahir prinsip dualitas Islam-negara, sebagai dasar NU menerima asas tunggal Pancasila. Alasan penerimaan NU terhadap Pancasila berkaitan dengan konsep masyarakat madani, yang menekankan paham pluralisme, yaitu: (1) aspek vertikal, yaitu sifat pluralitas umat dan adanya satu universal kemanusiaan, sesuai dengan Perennial Philosophy (Filsafat Hari Akhir) atau *Religion of the Heart* yang didasarkan pada prinsip kesatuan (tawhid), (2) aspek horisontal, yaitu kemaslahatan umat dalam memutuskan perkara baik politik maupun agama, dan (3) fakta historis bahwa KH A. Wahid Hasyim sebagai salah seorang perumus Pancasila, disamping adanya fatwa Mukhtamar NU 1935 di Palembang (Ismail :1999).

Maka dari itu, ditinjau dari kepentingan *Civil Society* di Indonesia pendekatan NU menjadi relevan karena beberapa hal. Pertama NU tidak lagi hanya membatasi diri pada upaya pemecahan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan warga Nahdliyyin saja, tetapi juga diperluas hingga kepentingan bangsa. Kedua, NU mengakui bahwa wilayah esensi bagi *Civil Society* kini menjadi salah satu komitmen utama perjuangan. Ketiga, NU pasca khittah 1984 telah berniat menitikberatkan gerakannya pada level masyarakat dan ditunjukkan untuk memperkuat kemandirian dan kepercayaan diri. Sehingga di masa yang akan datang NU benar-benar mampu menjadi organisasi yang mandiri untuk menciptakan peradaban.

Merujuk pada tulisan Dede Rosyada yang mengatakan bahwa prinsipnya konsep *Civil Society* merupakan sebuah tatanan komunitas masyarakat yang mengedepankan toleransi dan demokrasi. Sedangkan karakteristik masyarakatmadani antara lain adalah :

1. *Free Publik Sphere*

Adanya Ruang public yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat pada ruang publik.

2. Demokrasi

Warga Negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalani aktivitas keseharian, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Demokrasi

berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam pola kehidupan berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku, ras, dan agama.

3. Toleran

Merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat *Civil Society* untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan orang lain.

4. Pluralism

Mengakui dan menerima kenyataan social yang beragam, tapi harus disertai sikap yang tulus untuk menerima kenyataan perbedaan sebagai sesuatu yang alamiah dan rahmat tuhan yang bernilai positif bagi kehidupan masyarakat.

5. Keadilan Sosial

Keadilan yang dimaksud untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga Negara yang mencakup aspek kehidupan (Rosyada: 2003).

### **Sejarah Singkat Berdirinya Ranting NU Karangjoho**

Tidak diketahui secara pasti kapan NU Ranting Karangjoho mulai dibentuk, akan tetapi menurut penuturan dari beberapa tokoh NU yang sempat diwawancarai oleh penulis menuturkan bahwa pada era pertengahan tahun 60-an bibit-bibit kelahiran NU Ranting Karangjoho sudah mulai ada. Hal tersebut dapat terlihat dengan terlibatnya Kyai Hasyim Ashar dalam kepengurusan NU Cabang Ponorogo. Tokoh inilah yang di kemudian hari menjadi salah satu tokoh kunci berkembangnya NU di Desa Karangjoho dan Kecamatan Badegan.

Perlu diketahui bahwa pada saat itu organisasi NU Ponorogo belum sampai ke jajaran kepengurusan ranting seperti saat ini, struktur NU pada pertengahan tahun 60-an masih hanya sampai pada level kepengurusan cabang. Kyai Hasyim yang saat itu dibantu oleh beberapa tokoh lainnya, sebut saja Kyai Hambali (Blembem), Kyai Syamsudin (Pulosari), Pak Habib yang juga merupakan adik kandung Kyai Syamsudin dan beberapa tokoh lainnya dengan sepenuh tenaga melakukan sosialisasi NU kepada masyarakat guna melakukan pengenalan NU. Dengan harapan masyarakat mengenal NU dan kemudian bisa turut serta terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh NU.

Sebenarnya tidak hanya di wilayah Badegan, bahkan hingga meliputi beberapa wilayah yang sekarang masuk ke Kecamatan Jambon. Waktu itu sebelum adanya pemekaran wilayah, beberapa desa yang sekarang masuk ke Kecamatan Jambon

adalah bagian dari wilayah Kecamatan Badegan. Pada saat itu cukup banyak rintangan yang ditemui dalam proses awal pengenalan NU ini di masyarakat, pasalnya tidak semua masyarakat yang berada di wilayah tersebut masih cukup banyak dijumpai masyarakat non muslim. Selain itu kesulitan lain yang ditemui adalah karena terlalu ketatnya kontrol pemerintah terhadap segala jenis kegiatan masyarakat yang berbasis pengumpulan massa. Bahkan untuk sekedar melakukan kegiatan-kegiatan ritual keagamaan.

Belum lagi ditambah dengan memanasnya suhu politik nasional oleh karena konflik yang terjadi antara NU dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Kita ketahui bersama bahwa banyak kyai-kyai yang menjadi target operasi PKI tersebut sehingga hal ini juga berdampak kepada beberapa kyai di Kecamatan Badegan, termasuk Kyai Hasyim. Sehingga kondisi demikian menjadi masa-masa sulit untuk melakukan pengembangan NU di masyarakat.

Nahdlatul Ulama sebagaimana organisasi pada umumnya, mempunyai orientasi kerja dalam setiap kepengurusannya. Maka keberadaan visi dan misi organisasi menjadi satu hal penting yang harus dipahami oleh seluruh pengurus dan anggota organisasi tersebut guna memastikan arah gerak organisasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Adapun visi dan misi NU Ranting Karangjoho sebagai berikut:

1. Visi

Visi Pengurus Ranting NU Karangjoho adalah “Membumikan Islam yang Rahmatan Lil ‘Alamin sesuai akidah Ahlussunnah Wal Jama’ah”

2. Misi

Adapun misi pengurus Ranting NU Karangjoho adalah sebagai berikut:

1. Penataan organisasi. (*Institutional Building*) NU adalah merupakan permasalahan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program-program NU. Jika tidak ada perbaikan organisasi yang membuat struktur NU lebih berfungsi secara efektif dan efisien. Program yang tersusun sebaik apapun sulit terlaksana. Oleh karena itu pertanyaan yang harus dijawab dalam bentuk program adalah bagaimana caranya agar organisasi NU dengan segala perangkatnya dapat berfungsi dan bersinergi diantara sesamanya agar dapat mewujudkan visi NU.
2. Peningkatan amaliyah duniyah yang berpijak pada ajaran Islam ahlussunnah wal jama’ah dan berusaha menyebarkannya sebagai tanggung jawab NU kepada umat. Hal ini seiring dengan fenomena krisis moral di semua lini kehidupan yang menjadi salah satu penyebab

terjadinya krisis multidimensi. Oleh karena itu usaha-usaha untuk menyebarkan ajaran Islam yang berbasis moral ini akan dijabarkan dalam program lima tahun.

3. Pengembangan pemikiran kritis keagamaan dalam kerangka mereaktualisasikan dan menginterpretasikan ajaran Islam dikalangan NU. Merupakan issue yang dapat memberikan sumbangan penting bagi terwujudnya masyarakat yang berkeadilan dan demokratis, tetapi tetap dalam pengamalan ajaran Islam.
4. Pemberdayaan ekonomi umat. Merupakan issue penting bagi penciptaan tatanan masyarakat yang berkeadilan dan demokratis, karena keadilan dalam bidang ekonomi menyangkut tentang distribusinya yang sampai kini terjadi ketimpangan yang sangat jauh. Karena itu bagaimana mewujudkan keberdayaan umat sehingga terwujud keadilan ekonomi merupakan pertanyaan yang akan dijawab dalam program lima tahun ke depan.
5. Pendampingan dan pemberdayaan ummat di tingkat basis. Pendampingan dan pemberdayaan ini terkait dengan pengembangan profesi dan keterampilan masyarakat, terutama yang berbasis pertanian dan ketenaga kerjaan. Sebab, pada profesi ini akan kebanyakan terdapat warga NU. Hal ini juga dialamatkan sebagai usaha integral pemberdayaan ekonomi ummat. Oleh karena itu, issue tersebut akan dijabarkan dalam program NU lima tahun ke depan.
6. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat di lingkungan warga NU akan menghasilkan peserta didik yang bermutu dan selanjutnya menyumbang kepada kualitas ummat. Sehingga dapat memperkuat upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan demokratis. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan masyarakat yang beorientasi kepada keadilan dan demokratis perlu di jabarkan dalam program lima tahun kedepan. Peningkatan penggalan dana organisasi dan pengelolanya adalah salah satu unsur manajemen yang merupakan bahan bakar terlaksananya program organisasi. Karena itu cara peningkatan pendapatan organisasi dan peningkatan pengolahan akan dijabarkan dalam program ini.
7. Tuntutan kesetaraan dan kesederajatan anggota masyarakat akibat dari perbedaan hak berdasarkan gender, memerlukan perhatian serius bagi NU agar arah dan implikasinya bersifat positif dan sesuai dengan



kemaslahatan ummat yang berkeadilan.

8. Peningkatan kepekaan terhadap isue yang berkembang di tingkat lokal, baik yang terkait dengan kebijakan lokal maupun fenomena yang berkembang dalam masyarakat, seperti masalah lingkungan dan kependudukan. Isue tersebut akan dijabarkan dalam program lima tahun meliputi kegiatan pembinaan dan lain-lain

Adapun kegiatan dan rutinan yang dilakukan oleh Pengurus Ranting NU Karangjoho sebagai berikut:

1. Pemantapan ideologi paham Ahlussunnah wal jama'ah di masjid/mushola se-Desa Karangjoho, hal yang dilakukan oleh Ranting NU Karangjoho yakni melaksanakan pengajian rutin safari romadhon dengan tujuan agar tidak terjadi penyebaran paham-paham radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat.
2. Melakukan koordinasi aktif dengan masjid, mushola dan majelis ta'lim se-Desa Karangjoho. Dengan hal tersebut diharapkan akan tercipta kerjasama yang baik antara masjid, mushola dan majelis ta'lim dengan warga NU yang berada di Desa Karangjoho.
3. Mengadakan pengajian kitab Al-Hikam yang rutin dilaksanakan setiap ahad pahing yang bertempat di Masjid Ngerdani. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang ajaran agama Islam.
4. Yasinan rutin yang dilaksanakan setiap seminggu sekali. Hal tersebut selain menjadi kebiasaan masyarakat dalam menjalankan amaliyah tradisi, juga sebagai sarana bertemunya jamaah sehingga terjalin silaturahmi yang erat di masyarakat.
5. Mengadakan al-barjanji setelah selesai khataman Al-Quran.
6. Manaqiban
- 7.

### **Analisis Kondisi Masyarakat Desa Karangjoho**

1. Kondisi Perekonomian Masyarakat

Penduduk Desa Karangjoho dalam mata pencahariaanya mayoritas bergerak di bidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagai tertuang dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo. Hal ini yang perlu diperhatikan dalam pembanguna desa adalah melakukan usaha

perluasaan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil, pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan Desa Karangjoho yang masih tinggi menjadikan Desa Karangjoho harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf perekonomian bagi masyarakat. Kekayaan sumber daya alam yang ada di Desa Karangjoho amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu letak geografis desa cukup strategis.

Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran. Menurut peraturan Desa Karangjoho Nomor 02 tahun 2015, bahwa sumber pendapatan desa sebagai berikut:

## 2. Sumber Pendapatan Desa

- a. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong dan lain-lain pendapatan desa yang sah.
- b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten untuk desa dan retribusi kabupaten sebagai diperuntungkan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proposional
- c. Sebagian dari dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten untuk desa yang pembagiannya untuk setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa.
- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah.

## 3. Kondisi tingkat pendidikan

Pada dasarnya Tingkat pendidikan memang berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Akan tetapi melihat statistik data yang ada di Desa Karangjoho masih tergolong cukup rendah walaupun akses dalam mendapatkan pendidikan tingkat SD maupun SMA dekat dengan pemukiman warga. Maka permasalahan hal seperti ini perlu dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan bagi setiap individu tersebut.

## 4. Kondisi keagamaan

Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia seta lingkungannya. Maka di tinjau

dari agama dan kepercayaan bahwa masyarakat Desa Karangjoho mayoritas beragama Islam sejumlah 3013 jiwa dan beragama Kristen dengan jumlah 9 jiwa.

#### 5. Kondisi kesejahteraan sosial

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial. Upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitas sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan berdasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menajalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti dimkasud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdaayan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.<sup>1</sup>

Dengan melihat yang di paparkan oleh penulis tersebut, bahwa Desa Karangjoho cukup kurang memperhatikan dalam melakukan kesejateran sosial yang ada di masyarakat. Palsalnya dengan data yang di ketahui masih banyak jumlah penduduk yang tergolong miskin. Dalam hal ini ada beberapa data tingkat kesejahteraan sosial

Jumlah kepala keluarga (KK)	:	1058
Jumlah penduduk miskin	:	301
Jumlah penduduk sedang	:	189
Jumlah penduduk kaya	:	218

#### **Analisis Peran NU Ranting Karangjoho Dalam Mewujudkan *Civil Society***

Sebagaimana diketahui bersama bahwa NU merupakan organisasi sosial

<sup>1</sup> Republik Indonesia, "Undang-undang Dasar, Pasal 34 ayat (1)," 1945.

keagamaan yang berorientasi pada pembangunan harkat dan martabat umat. Hal tersebut menjadi wajar ketika sering kita jumpai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh NU baik secara langsung atau tidak diorientasikan untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat baik dari level terendah desa bahkan sampai lingkungan perkotaan. Tidak hanya pada hal berkaitan dengan kegiatan keagamaan semata, akan tetapi juga ada wilayah ekonomi, pendidikan, kebudayaan, politik dan lain sebagainya.

Hal inilah yang kemudian juga dilakukan oleh NU Ranting Karangjoho. Beberapa kegiatan yang selama ini ditekuni oleh NU Ranting Karangjoho sedikit banyak tentu memberikan dampak yang cukup signifikan di masyarakat secara luas di lingkungan Desa Karangjoho khususnya. Misal dari kegiatan yang berbasis pengembangan SDM melalui lembaga pendidikan, pengkajian kitab dan lain sebagainya hingga kegiatan amaliyah tradisi seperti yasinan, tahlilan, pengajian rutin dan lain sebagainya. Tentu kegiatan-kegiatan tersebut hadir bukan tanpa terencana.

Dalam analisis penulis kegiatan yang dilaksanakan oleh NU Ranting Karangjoho memberikan peranan dalam pemberdayaan masyarakat (*Civil Society*) dimana memberikan penekanan kepada perbaikan struktural organisasi terlebih ditunjukkan dalam pembuatan visi misi pengurus NU Ranting Karangjoho, dimana di dalam perancangan visi misi tersebut bertujuan membentuk masyarakat yang berkeadilan, kesetaraan, dan demokratis. Hal ini selaras dengan karakteristik dalam pembentukan *Civil Society* yakni:

1. *Free Public Shpare* yang mampu memberikan ruang bebas pada setiap masyarakat untuk dapat memiliki posisi dan hak serta kebebasan yang sama dalam mengemukakan pendapat untuk melakukan transisi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam. Dengan adanya media bsik cetak maupun digital yang menyuarakan informasi kepada publik. Hal ini juga terlaksana dalam kegiatan di NU Ranting Karangjoho dalam setiap kegiatannya menggunakan *Free Public Shpare* seperti pembuatan pamflet, brosur dan dokumentasi dalam kegiatan pengajian rutin dan safari ramadhan misalnya, dimana dengan informasi tersebut bisa di akses dan di ikuti oleh semua masyarakat, sehingga akan terjadi timbal balik komunikasi antara pengurus NU Ranting Karangjoho dengan masyarakat secara umum.
2. Demokrasi merupakan kebebasan dalam melakukan aktivitas yang di inginkan secara bebas dan merdeka tanpa tekanan dari pihak manapun dalam berbagai program kegiatan yang di rancang pengurus NU Ranting Karangjoho seperti kajian rutin kitab Al Hikam, manaqiban dan Yasinan rutin

yang di adakan di Karangjoho yang dilaksanakan tanpa adanya paksaan dan ancaman terlebih lagi dilaksanakan tanpa adanya diskriminasi terhadap golongan masyarakat tertentu.

3. Toleransi yang merupakan suatu sikap menghormati dan menghargai pendapat serta tindakan orang lain, terlepas dari perbedaan latar belakang, ras, suku, maupun agama. Seperti halnya seluruh kegiatan yang dilaksanakan ketika pengambilan keputusan NU Ranting Karangjoho dilaksanakan dengan musyawarah dan di dalamnya selalu menimbang berbagai pendapat yang di kemukakan oleh masyarakat tanpa memandang sejarah atau latar belakang pendidikan.
4. Plurarisme yang di maknai sebagai suatu sikap yang tulus tanpa pamrih untuk mengakui, memahami dan menerima kenyataan bahwa masyarakat yang ada sekarang ini merupakan masyarakat majemuk dengan berrbagai latar belakang. Seperti hal nya di Desa Karangjoho ini, di mana penduduk mayoritas adalah masyarakat NU namun tetap hidup secara berdampingan dengan mengabaikan perbedaan ang ada, baik itu dengan aliran organisasi keagamaan lain maupun etnis dan suku yang berbeda.
5. Keadilan bagi seluruh masyarakat merupakan keseimbangan dan pembagian yang proposional atas hak dan kewajiban setiap masyarakat yang mencakup seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, politik, dan pengetahuan. Begitu juga yang dilakukan oleh pengurus NU Ranting Karangjoho yang memeberikan kesempatan dan hak yang sama untuk ikut berkencimpung dalam kepengurusan NU Ranting Karangjoho, begitu juga tidak ada monopoli dan pemusatan berbagai aspek kehidupan yang dilakukan oleh sekelompok golongan tertentu, baik menyangkut tentang ekonomi, politik, dan proses pendidikan. Terlebih lagi di tunjukkan dalam setiap keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan dari pengurus NU Ranting Karangjoho tidak menitik beratkan hanya kepada satu golongan saja dengan memperhatikan keseimbangan dan pembagian yang proposional atas hak dan kewajiban setiap masyarakat.

Seperti yang sudah penulis sebutkan di awal bahwa NU memiliki peran dan tanggungjawab besar dalam upaya peningkatan harkat dan martabat umat, demikian pula yang menjadi bagian dari orientasi kegiatan yang seringkali dan bahkan telah menjadi rutinan di Desa Karangjoho. Berikut akan penulis paparkan program kegiatan apa saja yang menjadi program kegiatan NU Ranting Karangjoho serta bagaimana dampak yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tersebut.

## **Analisis Hambatan *Civil Society* NU Karangjoho**

Seperti layaknya organisasi lain, Ranting NU Karangjoho dalam menjalankan roda organisasi tentunya memiliki berbagai macam kendala dan hambatan. Tentu hal demikian menjadi catatan khusus bagi penulis agar dalam penelitian ini setidaknya mampu memberikan gambaran secara mendetail mengenai Ranting NU Karangjoho yang dalam hal ini termasuk di dalamnya mengenai hambatan Ranting NU Karangjoho dalam menjalankan roda organisasi. Dalam pembahasan ini penulis klasifikasikan hambatan dan kendala tersebut setidaknya dalam dua poin. Pertama, hambatan yang muncul dari internal organisasi.

Fasilitas infrastruktur yang dimiliki oleh NU Ranting sangat minim dan bahkan nyaris kekurangan. Infrastruktur yang penulis maksud di sini berupa peralatan-peralatan sebagai penunjang jalannya roda organisasi. Sebagai semisal alat-alat tulis, alat-alat lapangan, media sosial dan alat elektronik yang memadai seperti komputer dan printer, peralatan komunikasi dan lain sebagainya. Akibatnya beberapa hal tidak mampu dilakukan secara maksimal. Seperti pengarsipan, administrasi dan komunikasi.

SDM menjadi faktor utama bagaimana organisasi dapat diukur kinerjanya. Baiknya SDM yang dimiliki oleh sebuah organisasi akan berdampak baik pula bagi jalannya organisasi. Pun juga sebaliknya, apabila sebuah organisasi tidak memiliki SDM yang mumpuni untuk menjalankan roda organisasi maka akan tertatih-tatih organisasi tersebut. Belum lagi sebuah organisasi membutuhkan kepemimpinan di dalamnya, sehingga susah dalam memunculkan tokoh pemimpin yang berkarakter akibat faktor SDM yang lemah seperti yang dialami oleh Ranting NU Karangjoho. Memang ada beberapa orang yang secara pendidikan jauh melampaui yang lainnya. Akan tetapi itu masih dirasa belum cukup karena jumlahnya yang hanya sedikit.

Akibat yang paling menonjol dari lemahnya SDM yang dimiliki oleh Ranting NU Karangjoho adalah pada level struktur yakni pengurus yang tidak mampu bekerja secara profesional. Padahal dalam sebuah organisasi modern seperti NU membutuhkan pengurus-pengurus yang profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing agar roda organisasi mampu digerakan dengan baik. Tidak bisa dipungkiri memang karena sejauh ini memang tidak ada standarisasi kemampuan dalam rekrutmen pengurus NU Ranting Karangjoho. Tentu ini menjadi PR yang serius bagi Ranting NU Karangjoho untuk lebih serius dalam melakukan kaderisasi. Tidak hanya berfokus pada ideologisasi akan tetapi profesionalitas kader dan anggota harus juga menjadi target utama dalam kaderisasi ke depan. Jika NU

Ranting Karangjoho menginginkan organisasinya mampu show up.

Selain faktor lemahnya SDM di struktur NU Ranting Karangjoho, hambatan lain yang juga dianggap sangat berpengaruh bagi sukses dan lancarnya setiap agenda yang diadakan oleh NU justru hadir dari jamaahnya sendiri. NU Ranting Karangjoho juga layaknya ranting-ranting NU lain juga tidak hanya bertumpu pada pengurus semata. Jamaah memiliki peran sangat penting bagi organisasi NU. Hal ini terjadi karena NU memang merupakan organisasi jamaah. Sejauh ini saat diadakan event dan kegiatan ranting, banyak diantara jamaah NU yang enggan bahkan menolak untuk mengikuti dengan berbagai alasan. Akibatnya setiap agenda yang dilaksanakan menjadi kurang maksimal.

Selain beberapa faktor internal tersebut, terdapat pula faktor eksternal yang turut menghambat jalannya roda organisasi NU Ranting Karangjoho baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebuah kerjasama antar organisasi dan lembaga menjadi hal mutlak bagi kemajuan sebuah organisasi. Semakin banyak partner yang dimiliki oleh sebuah organisasi menandakan sebuah organisasi tersebut hidup dan berjalan. Namun dalam kasus yang dialami oleh Ranting NU Karangjoho tidak begitu memikirkan soal partnersip tersebut. Akibatnya banyak hal yang hanya dikerjakan secara mandiri namun tidak maksimal. Beberapa program pun juga akhirnya tidak mampu dilakukan seperti rencana pengadaan usaha mandiri NU. Dan perlu dipahami bahwa apa yang dimaksud oleh penulis soal kerjasama di sini tidak melulu berbicara hanya soal yang menguntungkan organisasi secara finansial, akan tetapi juga dalam bentuk dukungan dan partisipasi dan lembaga dan kelompok lain terhadap NU

Meskipun telah ada sejak lama, NU Ranting Karangjoho masih di nilai sebelah mata atau bahkan merasa bodo amat oleh masyarakat. Hal ini muncul akibat kurangnya sosialisasi mengenai program-program berbasis sosial kemasyarakatan oleh NU Ranting Karangjoho. Logikanya, bagaimana mungkin masyarakat umum akan tertarik untuk mengikuti kegiatan atau bahkan bergabung dalam jamaah NU, apabila NU tidak begitu dikenali oleh masyarakat. Bahkan sebagian orang menganggap NU layaknya partai politik oleh sebab pengaruh derasnya isu yang dibangun oleh oknum-oknum di media sosial. Tentu ini harus menjadi perhatian seluruh warga NU Ranting Karangjoho untuk bagaimana dapat lebih bisa mengenalkan NU kepada masyarakat luas di lingkungan Desa Karangjoho.

#### 4. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut: Peranan yang diambil oleh Ranting NU Karangjoho dalam mewujudkan *Civil Society* adalah dengan menerapkan nilai-nilai dan karakteristik *Civil Society* dalam segala aspek kegiatan di Ranting NU Karangjoho, yang tertuang dalam visi dan misi NU Ranting Karangjoho yakni terwujudnya masyarakat yang bermoral, demokratis, kesetaraan dan keadilan sesuai karakteristik terwujudnya *Civil Society*, yang terlaksana dari program kegiatan Ranting NU Karangjoho yakni pengajian rutin safari Ramadhan, yasinan rutin, manaqiban, pengajian rutin kitab al-hikmah, berdirinya taman pendidikan al-Qur'an Sunan Ampel serta gerakan koin NU dalam bentuk kotak infaq. Terdapat dua faktor yang menjadi hambatan Ranting NU Karangjoho dalam melakukan *Civil Society* yakni: Faktor internal yang meliputi, Kuarangnya fasilitas infrastruktur yang cukup, Kurangnya masalah pendanaan, Minimnya modal sumber daya manusia, Kurangnya profesional pengurus dalam menjalankan roda organisasi, Semakin berkurangnya para tokoh sesepuh NU, Kurangnya antusiasme jamaah NU dalam kegiatan ranting. Faktor eksternal meliputi, Minimnya partnersip Ranting NU Karangjoho dan Kurang tertariknya masyarakat umum pada NU Ranting Karangjoho

#### REFERENCES

- Baso, Ahmad. *Civil Society versus Masyarakat Madani*. Bandung, Pustaka Hidayah: 1999
- Baso, Ahmad. *Civil Society Versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran "Civil Society" Dalam Islam Indonesia* Pustaka Hidayah, 1999.
- Hikmah, Muhammad AS dan Franz Magnis Suseno, *Demokrasi dan civil society* Jakarta : Lp3es, 1996.
- Huberman, Miles, A. *Analisis data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Ismail, Faisal “*NU, Gusdurism, dan Politik Kyai*”. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008
- Qomar, Mujamil. *NU "Liberal" dari tradisionalisme Ahlusunnah ke Universalisme Islam* Bandung, Mizan Media Utama, 2002.
- Republik Indonesia, “Undang-undang Dasar, Pasal 34 ayat (1),” 1945.
- Rosyada, Dede, A. Ubaidillah Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Syahrum, Salim dan *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Citrapustaka Media, 2015.
- Ubaedillah, Achmad dan Abdul Rozak, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat*



*Madani* Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006